

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS
DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2015**



**MODEL PENGATURAN PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN HAK-HAK ATAS TANAH MASYARAKAT
BANTARAN DANAU LIMBOTO PROVINSI GORONTALO**

Peneliti Utama

**Nirwan Junus, SH.,MH
NIP. 19690602 200003 2 001**

Anggota

**Mohamad Rusdiyanto U.Puluhulawa,SH.,M.Hum
NIP. 197011051 199703 1 001**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOVEMBER 2015**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS**

Judul Kegiatan : Model Pengaturan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Bantaran Danau Limboto Provinsi Gorontalo

KETUA PENELITIAN

A. Nama Lengkap : Nirwan Junus, SH, MH
B. NIDN : 0002066906
C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
D. Program Studi : Ilmu Hukum
E. Nomor HP : 085256326906
F. Email :

ANGGOTA PENELITIAN (1)

A. Nama Lengkap : Mohamad Rusdiyanto U Putuhulawa, SH, M.Hum
B. NIDN : 0005117004
C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 tahun
Penelitian Tahun Ke : 1
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 50.000.000,-
Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 50.000.000,-
- Dana Internal PT : -
- Dana Institusi Lain : -



Gorontalo, 29 Oktober 2015
Ketua Peneliti,

(Nirwan Junus, SH, MH)
NIP/NIK. 196906022000032001



Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

(Prof. Dr. Abd. Kadim Masaong, M.Pd)
NIP/NIK. 196111141987031002

RINGKASAN

Judul Penelitian adalah, "*Model Pengaturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Bantaran Danau Limboto Provinsi Gorontalo.*" Pemanfaatan tanah oleh masyarakat yang berada di bantaran Danau Limboto merupakan salah satu penyebab hilangnya vegetasi asli dan rusaknya ekosistem, mengakibatkan danau tidak mampu menahan laju sedimentasi yang di bawah oleh aliran sungai. Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pemanfaatan hak-hak atas tanah masyarakat yang berada di bantaran danau Limboto Provinsi Gorontalo menurut undang-undang, serta menemukan model pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hak-hak atas tanah masyarakat yang berada di bantaran Danau Limboto Provinsi Gorontalo. Target khusus yang ingin dihasilkan dari penelitian yakni, pemberdayaan masyarakat bantaran danau Limboto melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Danau, Penetapan Zona Danau Limboto, yang meliputi batas daerah terluar danau dan bantaran danau serta PETA. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui tahapan wawancara maupun kuesioner, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian di peroleh bahwa, pengelolaan pemanfaatan hak-hak atas tanah masyarakat bantaran Danau Limboto selain untuk pemukiman juga sebagai salah satu sumber mata pencaharian bagi penduduk. Namun tidak menutup kemungkinan pemanfaatan hak-hak tersebut akan merubah struktur danau, sehingga luas danau maksimum akan terbatas sampai pada batas kepemilikan lahan, sehingga memerlukan kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab antar pemangku kepentingan agar pemanfaatan hak-hak atas tanah bantaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya terkait dengan model pengaturan pengelolaan pemanfaatan hak-hak atas tanah masyarakat bantaran Danau Limboto maka pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yakni Kepres No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Pengelolan Danau Limboto, Perda tentang RTRW Provinsi, Kab/Kota, Perda Pengelolaan DAS serta melakukan pendekatan pembebasan lahan /pelepasan hak, membentuk satgas untuk merevitalisasi Danau Limboto, serta membuat draft Peraturan Zonasi yang terdiri dari Zona Primer, Zona Sekunder dan Zona Tersier yang meliputi titik koordinat batas-batas wilayah penguasaan masyarakat bantaran Danau Limboto.

Keyword : Model, Pengaturan, Pengelolaan, Pemanfaatan, Hak Atas Tanah, Bantaran Danau Limboto.

PRAKATA

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, laporan kemajuan hasil penelitian ini dapat di selesaikan. Penelitian ini secara umum menguraikan tentang Pemanfaatan tanah/lahan oleh masyarakat bantaran Danau Limboto, yang secara sah akan merubah struktur danau , sebab dapat mengakibatkan penurunan fungsi danau itu sendiri serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Melihat kondisi danau saat ini yang telah mengalami pendangkalan dan penyusutan, maka memerlukan kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab antar pemangku kepentingan agar pemanfaatan hak-hak atas tanah bantaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kami sebagai tim peneliti menyadari, bahwa penelitian ini memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, kritik, saran dan pendapat menjadi sangat berguna untuk perbaikan isi penelitian ini.

Gorontalo, November 2015

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan.....	iii
Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Hak Pengelolaan Dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).....	4
B. Hak Menguasai dari Negara.....	5
C. Hak Atas Tanah.....	7
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
A. Tujuan Penelitian.....	11
B. Manfaat/Urgensi Penelitian.....	11
BAB IV. METODE PENELITIAN	12
A. Tipe Penelitian.....	12
B. Lokasi Penelitian	12
C. Populasi dan Sampel.....	12
D. Sumber Data dan Instrumen Pengumpul Data	13
E. Analisis Data.....	13
F. Alir Penelitian	14
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	15
A. Gambaran Umum.....	15

B. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat yang Berada di Bantaran Danau Limboto Provinsi Gorontalo Menurut Undang-undang.....	16
C. Model Pengaturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat yang Berada di Bantaran Danau Limboto Provinsi Gorontalo.....	25
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Pemukiman Penduduk di Bantaran Danau Limboto	21
Gambar 2 : Kondisi Danau Limboto Saat Ini	27
Gambar 3 : Penyebaran Enceng Gordok	31
Gambar 4: Peta Inlets Danau Limboto	33

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : PETA Danau Limboto Yang Lama	40
Lampiran 2 : PETA Danau Limboto Terbaru.....	41
Lampiran 3 : Instrumen Penelitian	42
Lampiran 4: Surat Tugas	43
Lampiran 5 : Susunan Organisasi Tim Peneliti Dan Pembagian Tugas	44
Lampiran 6 : Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penelitian	44
Lampiran 7 : Format Biodata Tim Pelaksana	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pentingnya fungsi tanah terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dirasakan semenjak era reformasi. Diawali dengan terbitnya undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Arti penting hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 9 Ayat 1) itu memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa hak milik yang dapat dipunyai bagi diri sendiri maupun bersama-sama dengan masyarakat.¹

Pemanfaatan tanah/lahan oleh masyarakat bantaran Danau Limboto merupakan salah satu penyebab hilangnya vegetasi asli dan rusaknya ekosistem lahan basah, sehingga menyebabkan danau tidak mampu menahan laju sedimentasi yang di bawah oleh aliran sungai.²

Danau Limboto telah di manfaatkan sejak dulu oleh penduduk Gorontalo. Pemanfaatan Danau Limboto dimulai pada masa penjajahan Belanda, terlihat dengan adanya bangunan pelabuhan dan pasar ikan di dirikan pada tahun 1932 dan di gunakan sebagai tempat pelelangan ikan.

Perkembangan Danau Limboto mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Adanya proses geologi dan campur tangan manusia merupakan penyebabnya. Penurunan luas maupun kedalaman danau terjadi pada periode 1930-an dengan kedalaman 14 M dengan luas kurang dari 9000 Ha, dan pada tahun 2003 kedalamannya tinggal 2 M dengan luas 2900 Ha.³

Kecenderungan masyarakat di sekitar danau memanfaatkan danau sebagai salah satu sumber mata pencaharian ikan dan memiliki areal tersendiri, sehingga daerah bantaran danau menjadi suatu daerah yang di miliki secara

¹ Maria S. W. Sumardjono, 2008. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Buku Kompas, Jakarta, hal.3

² Balitbang Pedalda

³ Badan Lingkungan Hidup dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo